

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PENETAPAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kebutuhan Pegawai (Hasil ABK)	Existing Pegawai	Formasi Pegawai	Kebutuhan PPNN *)	Jabatan PPNN
1.	Pengelola Pegawai	Subbag Kepegawaian	4	3	-1	1	Asisten Peng-administrasian Umum
2.	Dst.						

*) Keterangan :

Kebutuhan PPNN = Formasi Pegawai dalam keadaan minus (-)

.....,,,,,
Kepala Satuan Kerja

Nama
NIP

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

[**kop surat**]

KEPUTUSAN

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PENYELENGGARAAN UJIAN SELEKSI DAN PENUNJUKAN
TIM SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN)..... (SATUAN KERJA) TAHUN.....

SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/
KETUA STPN/KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROV ... /KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KAB/KOTA...

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk mendapatkan tenaga
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang
berkualitas, dipandang perlu menyelenggarakan Ujian
Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri (PPNPN) Tahun;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Seleksi
Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN) Tahun.....;

c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2.;

3.;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG
PENETAPAN PENYELENGGARAAN UJIAN SELEKSI DAN
PENUNJUKAN TIM SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN).....
(SATUAN KERJA) TAHUN.....
- KESATU : Menyelenggarakan Ujian Seleksi Pengadaan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan
..... Tahun.....
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam
Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Seleksi Pengadaan
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun.....
- KETIGA : Tim Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
bertugas menyelenggarakan pengadaan Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan
Tahun.....
- KEEMPAT : Tim Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
memperoleh honorarium sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
....., Mata Anggaran
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA SATUAN KERJA

Nama
NIP.

Tembusan :

1.
2. Pejabat Pembuat Komitmen

LAMPIRAN I KEPUTUSAN

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN TIM SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI (PPNPN)

KEMENTERIAN/STPN/KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI /
KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA.....

TAHUN

I. KETUA :

II. SEKRETARIS :

III. ANGGOTA : 1.

2.

3.

4. Dst.

KEPALA SATUAN KERJA

Nama
NIP

LAMPIRAN II KEPUTUSAN
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR HONORARIUM TIM SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

KEMENTERIAN/STPN/KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI /
KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA.....
TAHUN

NO.	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM
1.	KETUA	Rp.
2.	SEKRETARIS	Rp.
3.	ANGGOTA	Rp.
4.	Dst.	

KEPALA SATUAN KERJA

Nama
NIP

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT PENGUMUMAN

[**kop surat**]

PENGUMUMAN
NOMOR

TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
KEMENTERIAN/STPN/KANTOR WILAYAH BPN Prov /
KANTOR PERTANAHAN Kab/Kota.....
TAHUN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi...../Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.....*), memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN UMUM

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun;
- c. Berkelakuan baik;
- d. Memiliki kualifikasi dan keahlian sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan;
- e. Sehat Jasmani dan Rohani;
- f. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai di suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta;
- g. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik;
- h. Dst.....

II. PERSYARATAN KHUSUS

Memiliki kualifikasi pendidikan dan keahlian sesuai formasi :

No	Jabatan	Kualifikasi	Jumlah Formasi	Unit Kerja
1.	Asisten Pengadministrasi Umum Dsb...	Kompetensi yang disyaratkan oleh Tim Seleksi atas usul dari calon Unit Pengguna PPNPN	Jumlah Formasi yang tersedia yang dihitung berdasarkan ABK	Unit Kerja PPNPN akan ditugaskan

III. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Surat Lamaran yang ditandatangani oleh pelamar ditujukan kepada Panitia Penerimaan PPNPN, dilampiri dengan:

1. Fotocopy Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
3. Pas Photo terakhir berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
4. Daftar Riwayat Hidup dengan melampirkan keterangan pendukung (pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan, dsb) bila ada.
5. Surat pengalaman kerja bila ada;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
8. Persyaratan angka 6 dan 7 dilengkapi setelah dinyatakan lulus seleksi PPNPN;
9. Dst ...

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dibuka mulai tanggal secara *online* melalui
2. Dst... (memuat tata cara teknis pendaftaran)

V. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

1. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi akan dipanggil untuk mengikuti **Ujian**
2. Dst.... (memuat informasi tata cara ujian)

VI. PELAKSANAAN UJIAN (Tertulis/Praktek/Wawancara)*

Memuat informasi pelaksanaan, lokasi dan waktu ujian termasuk materi yang akan diujikan.

VII. KETENTUAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus diwajibkan daftar ulang/konfirmasi kepada Tim Seleksi, dengan membawa :
 - a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - b. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani
 - c. Menyiapkan Meterai Rp. 6000,- sebanyak 2 (dua) lembar
2. Seluruh lamaran yang masuk pada periode lamaran akan diikuti sertakan dalam seleksi administratif;
3. Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun.
4. Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan... Keputusan Tim Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta,
Tim Seleksi Pengadaan PPNPN
Ketua,

.....

FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU REGISTER SURAT MASUK

[**kop surat**]

BERITA CARA
PENUTUPAN BUKU REGISTER SURAT MASUK
NOMOR

Pada hari ini,.....tanggal.....(.....-.....-.....),
pukul, telah melakukan pemeriksaan Buku Register Surat Masuk
pada(*Satuan/Unit Kerja*), diperoleh data sebagai berikut:

1. Surat masuk tanggals.d. pukul.....berjumlah = Eksemplar
 2. Surat masuk tanggal pukul.....berjumlah = Eksemplar
- Jumlah surat masuk tanggal....s.d.berjumlah = Eksemplar

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM SELEKSI PENGADAAN PPNPN
.....(*Satuan Kerja*)
Tahun.....

Sekretaris,

Ketua,

.....
NIP

.....
NIP

Anggota,

.....
NIP

FORMAT BERITA ACARA SELEKSI ADMINISTRASI

[**kop surat**]

BERITA ACARA HASIL SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan
tahun (.....-.....-.....), Tim Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun, telah
selesai melaksanakan Seleksi Administrasi Penerimaan Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelamar Yang Lulus Seleksi Administrasi sebanyak =..... Orang
2. Pelamar Yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi sebanyak =..... Orang

Daftar Pelamar yang lolos dan tidak lolos seleksi administrasi sebagaimana
diuraikan dalam lampiran 1 Berita Acara Seleksi Administrasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN)

.....(*Satuan Kerja*)
Tahun.....

Sekretaris,

Ketua,

.....
NIP

.....
NIP

Anggota,

.....
NIP

FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

[**kop surat**]

PENGUMUMAN
NOMOR

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
DALAM RANGKA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI (PPNPN)

.....(*Satuan Kerja*)
TAHUN.....

Berdasarkan hasil seleksi berkas pendaftaran yang masuk dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), diumumkan bahwa peserta sesuai lampiran dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi dan selanjutnya dapat mengikuti tes, dengan membawa bukti pendaftaran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli pada:

Hari/Tanggal :
Waktu :
Registrasi :
Pelaksanaan :
Ujian :
Tempat :

.....

TIM SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN)

.....(*Satuan Kerja*)
Tahun.....

Ketua,

.....
NIP

FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS
[**kop surat**]

BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN)

NOMOR

Pada hari ini tanggalbulan tahun
..... (.....-.....-.....), telah dilaksanakan Ujian Tertulis Seleksi
Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun
....., tempat di Ruang pada Pukul

1. Jumlah Peserta yang mengikuti Ujian Tertulis:

JUMLAH PESERTA		JUMLAH TOTAL
Hadir	Tidak Hadir	

2. Jumlah Soal/Materi Ujian Tertulis:

JENIS SOAL/MATERI	JUMLAH SOAL/MATERI	
	Soal/Materi	Lembar Jawaban
.....		
TOTAL		

3. Pelaksanaan Ujian Tertulis:

Ujian Tertulis Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN) (*Satuan Kerja*) Tahun..... telah
dilaksanakan/berjalan dengan baik dan tertib/lancar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

PENGAWAS UJIAN

No	Nama/NIP	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.	Dan seterusnya...	

Mengetahui
Ketua tim Seleksi,

.....

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENGOLAHAN DATA HASIL TES

[**kop surat**]

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN DAN PENGOLAHAN DATA HASIL TES
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan
tahun (.....-.....-.....), di Tim Seleksi Pengadaan
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun
....., telah selesai melaksanakan Pemeriksaan Hasil Ujian Seleksi
Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Berdasarkan hasil pengolahan data Ujian sejumlah (.....)
peserta didapatkan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN)
.....(Satuan Kerja)
Tahun.....

Sekretaris,

Ketua,

.....
NIP

.....
NIP

Anggota,

.....
NIP

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN HASIL UJIAN SELEKSI

[**kop surat**]

BERITA ACARA
PENETAPAN HASIL UJIAN SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan
tahun (.....-.....-.....), di Tim Seleksi Pengadaan
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun
....., berdasarkan Pengolahan Data Hasil Ujian sesuai dengan Berita
Acara Pemeriksaan dan Pengolahan Data Hasil Tes Pengadaan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Nomor tanggal dapat
ditetapkan peserta yang lulus Ujian adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PPNPN)
.....(*Satuan Kerja*)
Tahun.....

Sekretaris,

Ketua,

.....
NIP

.....
NIP

Anggota,

.....
NIP

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PESERTA YANG DINYATAKAN
LULUS
[kop surat]

SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/
KETUA STPN/KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROV ... /KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KAB/KOTA...

NOMOR

TENTANG
PENETAPAN PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS UJIAN SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
.....(*Satuan Kerja*) TAHUN....

SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/
KETUA STPN/KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROV ... /KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KAB/KOTA...,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan Calon Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
.....(*satuan kerja*) Tahun....., dipandang perlu
menetapkan peserta yang dinyatakan lulus ujian seleksi;
b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan ...
tentang Penetapan Peserta yang Dinyatakan Lulus Ujian
Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri ...
Tahun....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2.dst;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Berita Acara Penetapan Hasil Ujian Seleksi
Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
.....(*Satuan Kerja*) Tahun Nomortanggal.....;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
.....(*Satuan Kerja*) Tahun..... Mata Anggaran.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS UJIAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN).....(*Satuan Kerja*) TAHUN.....
- KESATU : Peserta ujian yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan lulus ujian seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)..... (*Satuan Kerja*) Tahun.....
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud diktum KESATU diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)..... (*Satuan Kerja*) Tahun..... yang penetapannya dengan Keputusan Kepala.....
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) diatur dalam Kontrak Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Mata Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA SATUAN KERJA

Nama
NIP

Tembusan :

1. Kepala.....
2. Pejabat Pembuat Komitmen

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

[**kop surat**]

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/DIREKTUR
JENDERAL/ KETUA STPN/KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROV ... /KEPALA
KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA...
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
.....(*Satuan Kerja*) TAHUN....

SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/
KETUA STPN/KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROV ... /KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KAB/KOTA...,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat secara optimal, dibutuhkan jumlah pegawai yang cukup di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa pada saat ini pemenuhan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mencukupi, sehingga perlu dilakukan pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
- c. sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Dst
- Memperhatikan: 1. Surat Keputusan tentang Penetapan Peserta yang Dinyatakan Lulus Ujian Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun.....;

2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-911/MK.02/2015 tanggal 13 November 2015 perihal Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)(*Satuan Kerja*) Tahun..... Mata Anggaran.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN).....(*Satuan Kerja*) TAHUN.....
- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga), pada unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dan kepadanya diberikan penghasilan/bulan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) diatur dalam Kontrak Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Mata Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA SATUAN KERJA

Nama
NIP

Tembusan :

1. Kepala.....
2. Pejabat Pembuat Komitmen

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
 NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
 DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT
 KONTRAK KERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
[kop surat]

KONTRAK KERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI	UNIT KERJA :	
	NOMOR : TANGGAL KONTRAK :	
PEKERJAAN:	SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN PADA TAHUN	
	NOMOR : TANGGAL :	
SUMBER DANA: Dibebankan atas DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran untuk Honorarium Tenaga Mata anggaran kegiatan		
NILAI PEKERJAAN		
Jangka Waktu Pekerjaan	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
	Jumlah	
Terbilang :		
Pejabat Pembuat Komitmen	Jakarta, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 	

KONTRAK KERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

Nomor :, Tanggal:

KETENTUAN UMUM

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
(....-....-.....) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
NIK :
Pendidikan :
NPWP :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan untuk selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat untuk
mengadakan perjanjian Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JENIS PEKERJAAN

PIHAK KEDUA bekerja di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional pada dengan status PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) dengan pekerjaan sebagai

Pasal 2

JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
selama, terhitung mulai tanggalsampai
dengan.....

Pasal 3

PEMBAYARAN UPAH

- (1) Sumber anggaran untuk pembayaran upah PIHAK KEDUA berasal dari
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Tahun
Anggaran
- (2) Pembayaran upah kepada PIHAK KEDUA dibayarkan oleh PIHAK
PERTAMA di awal bulan berikutnya dengan memperhatikan laporan
kinerja PIHAK KEDUA oleh atasan langsung PIHAK KEDUA.

- (3) Selain pembayaran upah kepada PIHAK KEDUA dibayarkan tambahan sebanyak satu bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan yang telah ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menaati jam kerja sebagaimana jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menaati tata tertib kantor, serta dilarang melakukan kejahatan baik yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana/Perdata, Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta tidak melakukan perbuatan/tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian secara administratif, finansial dan atau dapat merusak citra PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA hanya dapat menggunakan fasilitas kantor seperti komputer, dan lain-lain sebagai penunjang pelaksanaan kerja dan tidak berhak membawa ke luar kantor, kecuali ada izin tertulis dari atasan langsung.

Pasal 5

SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis apabila tidak melaksanakan tugas dan pekerjaannya atau tidak masuk kantor 3 (tiga) hari kerja berturut-turut tanpa izin.
- (2) PIHAK KEDUA diberikan sanksi berupa Pemberhentian kerja apabila :
 - a. Melanggar tata tertib kantor;
 - b. Mendapatkan 3 (tiga) kali teguran tertulis;
 - c. Tidak melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan kontrak;
 - d. Melakukan perbuatan melawan hukum;
 - e. Membocorkan kerahasiaan Negara yang terkait dengan data-data kepegawaian.
- (3) PIHAK KEDUA diberikan pemotongan upah apabila tidak masuk kerja, terlambat masuk bekerja, dan/atau pulang sebelum waktunya tanpa alasan yang sah.

(Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda, dan penggunaan uang denda diatur oleh kepala Satker dengan pemotongan maksimal 50% dari upah yang diterima)

Pasal 6

BERAKHIRNYA KONTRAK KERJA

- (1) Kontrak Kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA berakhir apabila:
 - a. Berakhirnya jangka waktu kontrak kerja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2;
 - b. PIHAK KEDUA meninggal dunia/berhalangan tetap;
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5.
- (2) Dengan berakhirnya kontrak ini, maka PIHAK KEDUA tidak diberikan uang pesangon dan jasa lainnya.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA akan memutuskan perjanjian kontrak kerja sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak kerja, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya, dan atas pemutusan perjanjian seperti ini PIHAK KEDUA tidak berhak mendapatkan ganti rugi apapun dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pegawai Tidak Tetap tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini, akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Kontrak Tambahan/*addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini.

Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kontrak ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen

.....

PIHAK KEDUA

.....

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
 NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
 DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

A. ASPEK KINERJA

1. Sasaran kerja dan target ditentukan berdasarkan rincian pekerjaan PPNNP dan dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK)
2. Format penilaian aspek Kinerja adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI			NILAI CAPAIAN SKP
		Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
	Dst...							
Nilai Capaian SKP								*)
								**)

Keterangan :

1. Cukup Jelas
2. Kegiatan yang dilakukan mengacu sesuai SPK
3. Target *output* Kegiatan
4. Target Mutu Kegiatan
5. Target Waktu Kegiatan
6. Realisasi *output* Kegiatan
7. Realisasi Mutu Kegiatan
8. Realisasi Waktu Kegiatan
9. Nilai capaian yang didapatkan dengan rumus :

= Aspek kuantitas + Aspek Kualitas + Aspek Waktu

a. Aspek kuantitas diperoleh dari

$$= \frac{\text{Realisasi Output}}{\text{Target Output}} \times 100$$

b. Aspek kualitas diperoleh dari

$$= \frac{\text{Realisasi Mutu}}{\text{Target Mutu}} \times 100$$

c. Aspek Waktu diperoleh dari

- Jika efisiensi waktu ≤ 24

$$= \frac{1,76 \times \text{target waktu} - \text{realisasi waktu}}{\text{Target Waktu}} \times 100$$

- Jika efisiensi waktu > 24

$$= 76 - \left\{ \left(\frac{1,76 \times \text{target waktu} - \text{realisasi waktu}}{\text{Target Waktu}} \times 100 \right) - 100 \right\}$$

$$\text{Efisiensi Waktu} = 100 - \left(\frac{\text{Realisasi Mutu}}{\text{Target Mutu}} \times 100 \right)$$

*) Nilai Capaian SKP total dibagi jumlah butir kegiatan

***) Kualifikasi Nilai SKP

- a. 91 – ke atas : Sangat Baik
- b. 76 – 90 : Baik
- c. 61 – 75 : Cukup
- d. 51- 60 kurang : Kurang
- e. 50 ke bawah : Buruk

B. ASPEK SIKAP PERILAKU

1. Subbobot untuk setiap sasaran kerja adalah :

No	Sasaran Kerja	Sub Bobot	Nilai	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (4)
1	Orientasi Pelayanan	20 %
2	Integritas	20 %
3	Komitmen	20 %
4	Disiplin	20 %
5	Kerja sama	20 %
	TOTAL	100 %	

2. Nilai Untuk tiap sasaran kerja diperoleh dari hasil penilaian atasan langsung PPNPN dan rekan kerja PPNPN (PNS) dengan pernyataan pada formulir penilaian

- a. Pernyataan a untuk memperoleh nilai Orientasi Pelayanan
- b. Pernyataan b untuk memperoleh nilai Orientasi Integritas
- c. Pernyataan c untuk memperoleh nilai Komitmen
- d. Pernyataan d untuk memperoleh nilai Disiplin
- e. Pernyataan e untuk memperoleh nilai Kerja sama

3. Nilai dari aspek pembelajaran

Nama PPNPN :

Penilai : Atasan langsung/Rekan Kerja (*coret yang tidak perlu)

Berilah nilai pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat secara objektif

No.	Pernyataan	Nilai
a.	PPNPN dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi	
b.	PPNPN dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya	
c.	Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja	
d.	PPNPN menaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu menaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya	
e.	PPNPN mampu bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama	
	Jumlah	

Rentang nilai indikator sikap perilaku:

- a. 91 – ke atas : selalu
- b. 76 – 90 : sering
- c. 61 – 75 : kadang-kadang
- d. 51- 60 kurang : kurang
- e. 50 ke bawah : tidak pernah

4. Hasil penilaian aspek pembelajaran diberikan pembobotan sesuai dengan penilai

No	Penilai	Bobot	Skor Penilai	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (4)
1	Atasan langsung	60 %
2	Rekan Kerja	40 %
	TOTAL		

C. Penilaian PPNPN

Hasil penilaian untuk PPNPN adalah

No	Aspek	Bobot	Nilai	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (4)
1	Kinerja	60 %
2	Sikap Perilaku	40 %
	TOTAL		

D. Kategori Hasil Penilaian

- a. 91 – ke atas : Sangat Baik
- b. 76 – 90 : Baik
- c. 61 – 75 : Cukup
- d. 51- 60 kurang : Kurang
- e. 50 ke bawah : Buruk

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SURAT IZIN CUTI
NOMOR

1. Diberikan izin cuti sakit/melahirkan/karena alasan penting *) untuk tahun kepada:
Nama :
Jabatan :
Satuan Organisasi :
2. Selama ... (...) hari kerja/kalender, terhitung mulai tanggal ... sampai dengan tanggal ... dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebelum menjalankan cuti wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung.
 - b. Setelah menjalankan cuti wajib melaporkan diri kepada atasan langsung dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
3. Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Satuan Kerja,

Nama
NIP

*) coret yang tidak perlu

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

[**kop surat**]

KEPUTUSAN.....
NOMOR

TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
.....(*Satuan Kerja*)
TAHUN....

MENTERI/KEPALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan pengunduran diri sebagai PPNPN /Surat Keterangan Dokter / Berita Acara Pemeriksaan
- b. bahwa ;
- c. sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. dst;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)(*Satuan Kerja*) Tahun.....;
2. Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Nomor tanggal ... ;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (*Satuan Kerja*) Tahun Mata Anggaran.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)..... (*Satuan Kerja*) TAHUN.....

KESATU : Memberhentikan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri :
Nama :
NIK :
Unit :
karena yang bersangkutan

KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tersebut dalam diktum KESATU, diberikan hak-hak sesuai peraturan perundangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA SATUAN KERJA

Nama
NIP

Tembusan :

1. Kepala.....
2. Pejabat Pembuat Komitmen

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT
SURAT PEMUTUSAN KONTRAK KERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON
PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

[**kop surat**]

SURAT PEMUTUSAN KONTRAK KERJA
NOMOR

Sehubungan dengan pekerjaan sebagai sesuai dengan kontrak kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Nomor ... Tanggal ... disampaikan bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
NIK :

diberhentikan sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada ...

Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak KESATU dari kontrak tersebut melakukan pemutusan kontrak dengan pihak KEDUA sesuai dengan Surat Keputusan Kepala ... Nomor ... tanggal ... tentang Pemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

.....,,
Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama
NIP

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL